

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum dan menerapkan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha preventif maupun represif.

Upaya penegakan hukum itu bukan merupakan suatu hal yang dianggap mudah dan sederhana, karena hal tersebut terkait dengan berbagai aspek terutama aspek kemanusiaan. Pengertian kemanusiaan bersumber pada butir-butir sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Penghayatan terhadap butir-butir berupa pengakuan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban, semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mengharuskan mengutamakan tindakan preventif daripada represif, dan menempatkan faktor-faktor yang berkaitan dengan sipelaku tindak pidana dalam kedudukan yang penting disamping faktor-faktor yang berkaitan dengan perbuatannya¹

¹ Muladi.1985.*Lembaga Pidana Bersyarat*.Bandung: Alumni. Hal 8

Pemidanaan merupakan alat pertahanan terakhir dan merupakan puncak keseluruhan sistem upaya-upaya yang dapat menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti yang diharapkan masyarakat. Pemidanaan seyogyanya bilamana norma bersangkutan begitu penting bagi kehidupan dan kemerdekaan masyarakat. Hakim harus memperhitungkan semua tujuan pemidanaan dan Hakim tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan masyarakat saja atau kepentingan pembuat saja atau hanya memperhatikan kepentingan perasaan korban dan keluarganya.

Pendapat Roeslan Saleh, ada beberapa hal yang dapat ditekankan hakim dalam putusannya, artinya ada beberapa tujuan yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan putusan pidana² :

1. Yang pertama disebut Koreksi, yaitu terhadap orang yang melanggar suatu norma, pidana yang dijatuhkan berlaku sebagai suatu peringatan bahwa hal seperti itu tidak boleh berulang lagi.
2. Kedua adalah Resosialisasi, adalah usaha dengan tujuan bahwa terpidana akan kembali kedalam masyarakat dengan daya tahan, dalam arti bahwa dia dapat hidup dalam masyarakat tanpa melakukan lagi kejahatan-kejahatan.
3. Ketiga adalah Pengayoman, adalah untuk manusia yang telah melakukan kejahatan berat dan harus dikhawatirkan, ditakuti diwaktu yang akan datang masih besar sekali kemungkinannya melakukan delik berat walaupun telah diadakan usaha-usaha resosialisasi.

² Roeslan Saleh.1987.*Stelsel Pidana Indonesia*.Jakarta .Aksara Baru. Hal 5-6

Di Indonesia juga terdapat masalah mengenai adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara dalam kenyataannya sangat merugikan terhadap individu yang dikenai pidana. Berhubungan dengan masalah ini maka harus dicarikan mencari alternatif dari pidana penjara antara lain dalam bentuk pendayagunaan pidana bersyarat. Sanksi pidana bersyarat dijadikan sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang akan ditentukan oleh kemampuan sanksi pidana bersyarat tersebut untuk memenuhi tujuan pemidanaan.

Pidana Bersyarat, yaitu dalam hal pidana atas kebebasan seseorang dimana hakim dapat menetapkan suatu syarat umum yaitu bahwa terhukum selama masa percobaan yang ditentukan tidak akan melakukan suatu perbuatan pidana, dan syarat khusus yaitu ditujukan khusus terhadap kelakuan terhukum. Pidana bersyarat dapat diadakan bilamana Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun. Dalam KUHP tidak terdapat istilah hukuman percobaan melainkan istilah “Pidana Bersyarat” namun pengertiannya sama saja.

Andi Hamzah dan Siti Rahayu mengatakan bahwa³ :

Pidana bersyarat adalah menjatuhkan pidana pada seseorang akan tetapi pidana itu tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ternyata bahwa terpidana sebelum batas tempo percobaan berbuat sesuatu tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian (syarat-syarat) yang diberikan kepadanya oleh hakim jadi keputusan pidana tetaplah ada akan tetapi hanya pelaksanaan pidana itu yang tidak dilakukan.

Pemidanaan harus diberikan secara tepat sesuai dengan keadaan pribadi pelanggar hukum, lembaga pidana bersyarat dapat dipakai sebagai alternatif

³ Andi Hamzah dan Siti Rahayu.1983.*Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Jakarta. Akademika Pressindo

dalam pemberian pidana pelanggaran hukum. Penjatuhan sanksi bukan hanya untuk melindungi masyarakat tetapi harus mampu membina si pelanggaran hukum. Dalam hal ini Hakim dapat dituntut untuk mengambil keputusan secara tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa. Hakim menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan meliputi hal-hal kepribadian terdakwa, unsur terdakwa dan sopan santun terdakwa dalam pemeriksaan tersebut.

Pemidanaan bersyarat bermaksud memberi kesempatan kepada terpidana agar supaya dalam masa percobaan itu ia dapat memperbaiki dirinya di masyarakat dan tidak melanggar syarat-syarat yang ditentukan oleh Hakim kepadanya.

Hal ini diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f KUHP. Didalam Pasal 14a KUHP dinyatakan pidana bersyarat dapat dijatuhkan bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Yang menentukan bukanlah pidana yang diancamkan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan pada si terdakwa.
2. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun.

3. Dalam hal yang menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh terdakwa.

Dalam Pasal 14b KUHP ditentukan masa percobaan selama tiga tahun bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut dalam Pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 KUHP dan bagi pelanggaran lainnya.

Didalam Pasal 14c KUHP ditentukan bahwa disamping syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya.

Bilamana syarat umum atau khusus tersebut tidak dipenuhi, maka berdasar Pasal 14f ayat (1) hakim atas usul pejabat yang berwenang menjalankan putusan dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan atau memerintahkan supaya atas namanya diberikan peringatan pada terpidana

Pasal 14d KUHP mengatur tentang pejabat yang disertai tugas untuk mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan. Kemudian didalam Pasal 14d ayat (2) ditentukan bahwa untuk memberikan pertolongan atau membantu terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus, hakim dapat mewajibkannya kepada lembaga yang berbentuk badan hukum atau pemimpin suatu rumah penampung atau pejabat tertentu.

Pemikiran dasar yang melandasi sanksi pidana bersyarat sebenarnya sangat sederhana. Pidana ini secara keseluruhan bertujuan untuk menghindari

terjadinya tindak pidana lebih lanjut, dengan cara menolong perpidana agar lebih hidup produktif di dalam masyarakat telah dirugikan olehnya. Cara yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan ini adalah dengan cara mengarahkan pelaksanaan sanksi pidana kedalam masyarakat, daripada mengirimkan ke lingkungan yang bersifat buatan atau tidak normal, dalam bentuk perampasan kemerdekaan.

Hal ini tidak berarti bahwa sanksi pidana bersyarat harus digunakan untuk semua kasus, atau akan selalu menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada sanksi pidana pencabutan kemerdekaan. Yang harus ditekankan dalam hal sanksi pidana bersyarat adalah, bahwa sanksi pidana bersyarat harus dapat menjadi suatu lembaga hukum yang lebih baik daripada sekedar merupakan suatu kebaikan atau kelonggaran atau kemurahan hati dan menjadi sarana koreksi yang tidak hanya bermanfaat bagi terpidana melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat hal tersebut sebagai bahan dalam penyusunan skripsi dengan mengambil judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT BESERTA PENGAMATAN dan PENGAWASAN PELAKSANAANYA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)”**.

B. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan ini tidak terlalu luas dan mempermudah penulis dalam membuat penulisan, maka penulisan ini akan pada dibatasi pada pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat beserta pengamatan dan pengawasan pelaksanaannya (studi kasus di Pengadilan Sukoharjo).

C. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian merupakan hal yang penting, karena digunakan untuk mempermudah peneliti serta digunakan sebagai pedoman agar sasaran yang ingin dicapai jelas, terarah dan sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat?
2. Apakah yang menjadi dasar hukum pengamatan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan kepada terpidana bersyarat?
3. Bagaimanakah pengamatan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan terpidana bersyarat?
4. Kendala apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan pengamatan dan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat?

D. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas. Hal ini diperlukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya dicari oleh peneliti sehingga memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Selain itu penelitian bertujuan untuk dapat mengetahui metode dan kombinasi metode penelitian manakah yang paling baik dan tepat digunakan dalam masing-masing hukum penelitian⁴.

Berdasarkan hal tersebut maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Tujuan Subjektif

- a. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan guna penulisan penelitian, sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis dalam bidang penelitian hukum.
- c. Untuk menambah pengetahuan dalam praktek, sehingga dengan memperoleh pengetahuan dalam praktek lebih memperdalam wawasan bagi penulis dalam memahami bidang hukum.

2. Tujuan Objektif

- a. Mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana bersyarat, dengan memberikan alternatif pemecahan baik teoritis maupun praktis guna menunjang pendayagunaan pidana bersyarat di Pengadilan

⁴ Sumarjati Harjono. 1994. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: UGM Press, hal. 4.

Negeri Sukoharjo dalam rangka pembangunan hukum pidana yang berperikemanusiaan.

- b. Mengetahui pengamatan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan terpidana bersyarat serta mencari pembenaran normatif dan empiris tentang perlunya pendayagunaan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Sukoharjo.
- c. Mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan pengamatan dan pengawasan terpidana bersyarat.

E. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran dibidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada, khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat, pengamatan dan pengawasan pelaksanaan pembinaan terpidana bersyarat, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengamatan dan pengawasan terpidana bersyarat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim dan masyarakat pada umumnya mengenai penjatuhan pidana bersyarat.

F. Kerangka Pemikiran

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan menjunjung nilai-nilai keadilan hukum, sehingga sebagai negara yang berdasarkan hukum maka negara berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan mencegah terjadinya tindak pidana atau kejahatan dimasyarakat. Pencapaian tujuan itu tentunya harus dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa termasuk dalam konsep pemidanaan dan pelaksanaannya.⁵

Konsep negara hukum membawa keharusan untuk mencerminkan sendi-sendi kehidupan dalam bidang hukum, khususnya hukum acara pidana terkait proses peradilan dalam hal penjatuhan sanksi pidana oleh hakim. Penjatuhan putusan oleh hakim tidak terlepas dari sesuatu yang diyakini dan terbukti disidang pengadilan. Hakim sebagai penegak hukum pertama-tama harus mengusahakan tegaknya hukum dan tegaknya keadilan, dalam seluruh pelaksanaan tugasnya sebagai hakim yang paling sulit adalah pada saat menjatuhkan putusan. Supaya rasa keadilan itu ada dan hidup dalam masyarakat, seorang hakim yang baik harus mengukur apakah putusannya sudah mampu memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Oemar Seno Adji mengatakan bahwa :

“Ia (Hakim) harus memperhitungkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Ia harus melihat kepribadian dari pelaku perbuatan, dengan umurnya, tingkat pendidikan, apakah ia pria atau wanita, lingkungannya, sifatnya sebagai bangsa dan hal-hal lain”⁶

⁵ Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta : Paradigma. Hal. 160-161

⁶ Oemar Seno Adji. 1980. *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga , hal: 8

Pidana bersyarat merupakan cara penerapan pidana yang dalam pengawasan dan pelaksanaannya dilakukan diluar penjara. Pada hakikatnya pidana bersyarat adalah suatu pidana atas kebebasan terhukum dengan syarat-syarat tertentu tidak dilaksanakan. Secara fisik terpidana memang bebas dalam arti tidak diasingkan dalam masyarakat dalam suatu penjara atau lembaga pemasyarakatan, akan tetapi secara formal statusnya tetap terpidana karena ia telah dijatuhi pidana hanya saja dengan pertimbangan tertentu pidana itu tidak perlu dijalani. Pidana akan tetap dijalani apabila ternyata terpidana telah melanggar. Sebelum menjatuhkan putusan hakim pengadilan wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum yang terkandung dalam masyarakat. Dalam pertimbangan berat ringannya pidana, hakim wajib pula mempertimbangkan sifat baik dan jahatnya terdakwa.

Dalam pidana bersyarat, terdapat syarat-syarat dibagi atas dua macam yaitu :

1. Syarat umum yaitu bahwa si terdakwa selama masa percobaan tidak akan melakukan suatu perbuatan pidana lagi. Terdapat dalam Pasal 14a ayat (4)

KUHP yang berbunyi :

“Perintah tersebut dalam ayat 1 hanya diberikan jika hakim , berdasarkan penyelidikan yang teliti, yakin bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhi syarat umum, yaitu bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya syarat-syarat itu ada “ .

2. Syarat khusus yaitu sesuai dengan kebijakan hakim, Pasal 14c KUHP yang berbunyi :

“Dalam perintah yang dimaksud dalam pasal 14a kecuali jika dijatuhkan denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaan harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tadi .”

Dengan demikian dalam penjatuhan pidana bersyarat harus didasarkan atas pemeriksaan dan pertimbangan yang diteliti dan cermat. Pengamatan, pengawasan dan pembinaan bagi terpidana bersyarat dilaksanakan berdasarkan atas asas kemanusiaan, dalam pelaksanaan dibantu oleh instansi-instansi terkait yang mendukung keberhasilan tujuan pembedaan bersyarat,

G. Metode Penelitian

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak dalam suatu penelitian.

Metodologi penelitian yang penulis susun meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis susun merupakan penelitian normatif empiris.

Normatif yaitu penelitian ini untuk menemukan asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dari perangkat kaedah-kaedah hukum yang terhimpun dalam suatu kodifikasi atau peraturan perundang-undangan tertentu, penelitian terhadap taraf sinkronisasi dari peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal, sejarah hukum yang menitikberatkan pada perkembangan hukum yang objek penelitiannya berupa peristiwa-peristiwa individual/ khusus konkret, dan keputusan hakim dan bertujuan menguji apakah yang menjadi norma hukumnya dari suatu peristiwa konkret tertentu. Penelitian empiris dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti

hukum dalam gerak operasionalnya. Pendekatan ini mengkaji konsep normatif empiris pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat beserta pengamatan dan pengawasan pelaksanaannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaannya dalam lingkungan hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif⁷, yaitu untuk memberikan gambaran mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat beserta pengamatan dan pengawasannya yang diberikan dari pengadilan negeri Sukoharjo baik secara normatif maupun empirisnya di wilayah Sukoharjo.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dengan metode penelitian kualitatif, karena data penelitian ini berupa data kualitatif yaitu data yang berwujud uraian, informasi verbal, dan pendapat dari informan, maka data dalam penelitian ini tidak berupa angka dan direncanakan, tidak diangkakan serta tidak akan dilakukan perhitungan dengan rumus statistik sosial tertentu dalam analisis data penelitian ini. Sifat penelitian normatif empiris dapat diketahui dari pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat beserta pengamatan dan pengawasan terhadap terpidana bersyarat

⁷ Bambang Sunggono.1997.*Metodologi Penelitian Hukum*.Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal.35. "Penelitian deskriptif umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu,mengenai sifat-sifat,karakteristik atau faktor-faktor tertentu

dan kendala- kendala dalam pengamatan dan pelaksanaannya di pengadilan negeri Sukoharjo.

4. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan pertimbangan instansi tersebut dapat memberi informasi yang dibutuhkan penulis berkaitan dengan judul yang diambil serta atas dasar homogenitas formal kehidupan hukum pidana di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan sistem pembinaan narapidana, maka di wilayah Pengadilan Sukoharjo dijadikan sebagai tempat penelitian sepanjang menyangkut hal-hal yang memerlukan studi dokumen terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, maka wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo dapat dipandang sebagai wilayah yang mewakili.

5. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan adalah :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara suatu pengajuan pertanyaan kepada hakim pengadilan negeri Sukoharjo atas putusan pidana bersyarat. Data primer diperoleh melalui wawancara tentang :
 - 1) Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap terdakwa?
 - 2) Apa yang menjadi dasar hukum bagi hakim dalam memutus pidana bersyarat?

- 3) Bagaimanakah bentuk pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim terhadap terpidana bersyarat?
 - 4) Kesulitan apa saja yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam pengamatan dan pengawasan terhadap terpidana bersyarat?
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, majalah, makalah, peraturan perundang-undangan dan literatur lain yang berkaitan dengan pidana bersyarat dan serta bersumber dari arsip kasus dan putusan tentang pidana bersyarat.

6. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dimana data bisa diperoleh. Berdasarkan jenis datanya, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber data primer

Yaitu sejumlah data atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui suatu penelitian lapangan dengan wawancara tersusun atau spontan kepada hakim di pengadilan negeri Sukoharjo.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang secara langsung diperoleh melalui bahan-bahan dokumen putusan hakim, literatur-literatur yang relevan, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana bersyarat sehingga menunjang penelitian yang dilakukan..

7. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan sebagai berikut :

a. Wawancara

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan atau informasi secara langsung dari hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Informasi ini digunakan dalam rangka usaha mencari kejelasan permasalahan yang akan dibahas, maka dirasakan perlunya untuk juga menemukan informasi yang berupa tanggapan para pihak yang erat terlibat dengan masalah pelaksanaan pidana bersyarat. Dalam hal ini hakim pengadilan negeri Sukoharjo

b. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan atau *library research* merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data dari bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan hal yang diteliti. Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka.

8. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif⁸. Oleh karena itu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana bersyarat, kemudian akan didiskusikan dengan data yang diperoleh dari pengadilan negeri Sukoharjo sehingga pada akhirnya akan ditemukan hukum dalam kenyataannya.

⁸ Winarno Surakhmad. 1988. *Paper, skripsi, thesis, desertasi*. Bandung: Tarsito. Hal. 16. Mengemukakan, analisis kualitatif adalah suatu analisa yang memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban responden untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain, kemudian disusun secara sistematis

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan cara penelitian yang menghasilkan data analisis interaktif yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis maupun tidak tertulis/lisan juga perilaku nyata. Dalam penelitian kualitatif, proses analisisnya dilakukan sejak awal bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dalam model ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian.⁹ Adapun ketiga tahap tersebut adalah :

a. Reduksi Data

Kegiatan ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus-menerus sampai laporan akhir penelitian selesai.

b. Penyajian Data

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah memahami arti dari berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya peneliti mengambil kesimpulan.¹⁰

⁹ HB. Soetopo, 2002, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press, hal. 35

¹⁰ HB. Soetopo, 2002 :*Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press, hal. :37

H. Sistematika Penelitian

Penulisan hukum ini terbagi dalam empat bab yang setiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I adalah pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II merupakan Tinjauan Pustaka yang dibagi menjadi empat sub-bab yaitu syarat-syarat pemidanaan, pertimbangan hakim dalam kajian teoritis, pengertian dan syarat penjatuhan pidana bersyarat yang terdiri dari pengertian pidana bersyarat dan syarat penjatuhan pidana bersyarat, dan konsep pengamatan dan pengawasan.

BAB III merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat, pengamatan dan pengawasan terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat serta kendala dalam pelaksanaan pidana bersyarat.

BAB IV Penutup merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN